

EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (ETAP) DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AUDITAN PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Nedsal Sixpria¹⁾, Titi Suhartati, dan Sabar Warsini

Email: nedsal_fitri@yahoo.co.id¹⁾

Abstrak

Penelitian ini dilakukan secara bertahap selama dua tahun. Penelitian dilakukan dengan pendekatan pokok penelitian kualitatif dengan menggunakan objek penelitian UMKM di wilayah Depok dan sekitarnya. Penelitian menggunakan data primer dengan metode survey menggunakan kuesioner dan wawancara dengan responden. Pada tahun pertama, difokuskan pada penyusunan panduan proses akuntansi berdasarkan SAK ETAP untuk UMKM, melalui tahapan: mengidentifikasi perusahaan UKM yang akan menjadi objek penelitian melalui instansi terkait, menyusun dan melakukan pengujian instrumen penelitian, mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden, verifikasi dan mengolah data penelitian, menganalisis data dan menyimpulkan, menyusun Laporan Penelitian. Direncanakan penelitian pada tahun pertama menghasilkan luaran berupa Panduan Proses akuntansi berdasarkan SAK ETAP untuk UMKM. Pada tahun ke-dua, difokuskan pada membuat Panduan Penyusunan Laporan Keuangan yang layak audit untuk UMKM, melalui tahapan: Sosialisasi dan Implementasi Panduan Proses akuntansi berdasarkan SAK ETAP untuk UMKM, Evaluasi Panduan Proses akuntansi berdasarkan SAK ETAP untuk UMKM melalui umpan balik (feed back) dari responden, Menganalisis dan Menyempurnakan Panduan Proses akuntansi berdasarkan SAK ETAP untuk UMKM, dan Menyusun Laporan penelitian. Direncanakan penelitian pada tahun ke-dua menghasilkan luaran berupa Panduan Penyusunan Laporan Keuangan yang layak audit.

Kata Kunci: proses akuntansi, laporan keuangan, UMKM

Abstract

The study was conducted with a qualitative research approach using the principal object of study of SMEs in Depok and surrounding areas. Research using primary data with survey method using questionnaires and interviews with the respondents. In the first year, is focused on the development of guidelines by SAK ETAP accounting process for SMEs, through the stages : identifying SMEs that will be the object of research through relevant agencies, develop and test research instruments, collecting data through interviews with respondents, verification and processing research data, analyzed the data and concluded, prepare research reports. This research is planned in two years, the first year produce outputs in the form of user processes by SAK ETAP (accounting for SMEs). In the second year, is focused on making free preparation of financial statements for audit viable SMEs, through the stages of : dissemination and implementation guide by SAK ETAP process accounting for SMEs, accounting process evaluation guide by SAK ETAP for SMEs through feedback of respondents, analyze and improve process guide by SAK ETAP accounting for SMEs, and develop reports. Also in second year is planned outputs produces a guide worthy for audited financial statements.

Keywords: accounting process, financial statements, SMEs

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti memiliki peran dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2009 tercatat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 45% atau senilai Rp2.000 triliun, sedangkan untuk tahun 2010 diperkirakan UMKM mampu memberi kontribusi lebih besar lagi kepada PDB Indonesia yakni sekitar Rp3.000 triliun (www.depkop.go.id). Pada tahun 2010 jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 52.2 juta unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Besarnya jumlah UMKM tersebut mencerminkan besarnya potensi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan bagi UMKM untuk dapat lebih berkontribusi bagi negeri ini. Di saat banyak perusahaan besar yang bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM mampu menyerap para pengangguran untuk dapat bekerja kembali. Pencapaian yang luar biasa dan potensi yang besar dari UMKM tersebut sering terkendala masalah permodalan untuk mengembangkan usaha serta masalah pemasaran produk kepada masyarakat. Pada dasarnya UMKM memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan kredit sebagai suntikan modal. Hingga saat ini banyak program pembiayaan bagi UMKM baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh perbankan.

Salah satu program pemerintah Indonesia terkait pembiayaan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada tahun 2009 ditargetkan sekitar Rp20 triliun. Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM, sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala untuk akses terhadap perbankan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan (Basri & Nugroho, 2009). Namun pada prakteknya realisasinya jauh dari target Rp20 triliun yakni hanya sebesar Rp14,8 triliun. Penyebab rendahnya penyaluran

KUR tersebut karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR masih terlalu berhati-hati dalam penyaluran kredit, karena tidak memiliki akses informasi yang memadai terkait kondisi UMKM. Mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga membuat informasi tersebut menjadi lebih mahal bagi perbankan (Baas dan Schrooten, 2006). Informasi akuntansi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.

Namun praktek akuntansi keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2004; Raharjo & Ali, 1993; Benjamin, 1990). Pihak bank dan fiskus seringkali mengeluhkan ketidakmampuan dan atau kelemahan-kelemahan UKM dalam menyusun laporan keuangan. Benjamin (1990) berpendapat bahwa kelemahan UKM dalam penyusunan laporan keuangan itu antara lain disebabkan rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan Satyo(2005) berpendapat bahwa rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UKM. Standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten.

Karena UKM memiliki berbagai keterbatasan, kewajiban seperti itu diduga dapat menimbulkan biaya yang lebih besar bagi UKM dibandingkan dengan manfaat yang dapat dihasilkan dari adanya informasi akuntansi tersebut (*cost-effectiveness*). Di samping itu, tersedianya informasi yang lebih akurat melalui informasi akuntansi yang dihasilkan diduga tidak mempengaruhi keputusan atas masalah yang dihadapi manajemen (*relevance*). Dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi

keuangan, menghitung pajak, dan manfaat lainnya (Warsono & Murti, 2010).

Pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan merupakan hal yang masih sulit bagi UMKM. Keterbatasan pengetahuan pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM (Jati et.al., 2009). Berbagai macam keterbatasan lain dihadapi oleh UMKM mulai dari latar belakang pendidikan yang tidak mengenal mengenai akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dan rajinnya dalam pelaksanaan pembukuan akuntansi, hingga tidak adanya kecukupan dana untuk mempekerjakan akuntan atau membeli *software* akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi.

Terkait dengan kondisi tersebut di atas, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan. Penggunaan SAK ETAP ini adalah ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan 2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan salah satu Standar Akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Secara umum SAK ETAP ini lebih mudah dipahami dan tidak sekompleks SAK Umum. Selain adanya SAK ETAP tersebut, kemudahan lain bagi UMKM dalam hal pembukuan akuntansi adalah semakin banyaknya *software* akuntansi buatan dalam negeri maupun luar negeri yang telah secara khusus dirancang bagi UMKM seperti *Accurate* dan *Zahir*. Masa mendatang diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan

laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan tentunya memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM.

Hasil penelitian Junita (2009) dengan responden UKM di Padang menunjukkan bahwa pengusaha UKM tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap kebutuhan atas laporan keuangan, dengan demikian pengusaha UKM tidak memahami fungsi audit dan kebutuhan audit terhadap laporan keuangan. Persepsi yang dimiliki oleh para pengusaha UKM masih sederhana, persepsi tersebut belum sampai tahap menganalisis audit atas laporan keuangan dengan menggunakan ilmu audit secara lengkap.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman UKM mengenai audit masih rendah karena UKM belum memahami manfaat dari laporan keuangan auditan. Banyak sekali manfaat yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah diaudit, antara lain kepastian bahwa perusahaan telah melakukan pencatatan atas seluruh transaksi yang terjadi dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (SAK) sehingga dengan demikian manajemen perusahaan memiliki data laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya tingkat akurasinya, untuk keperluan pengambilan keputusan. Manfaat lainnya terkait dengan persyaratan kredit dari lembaga keuangan. Perusahaan memerlukan pemeriksaan yang harus dilakukan secara independen pada akhir tahun, misalnya, diperlukan sebagai laporan kepada pemberi pinjaman/bank, perusahaan juga dapat menghemat biaya untuk membayar kantor akuntan publik dimana sebagian besar pekerjaan telah dikerjakan secara internal sepanjang tahun dan oleh karenanya perusahaan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menegosiasikan biaya pemeriksaan oleh kantor akuntan publik.

Adanya prosedur pengawasan / pemeriksaan dalam perusahaan atas

pembukuan yang dilakukan secara internal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pihak ketiga/bank dalam membaca laporan keuangan perusahaan.

Dari latar belakang nampak bahwa pemahaman para pengusaha UMKM terhadap laporan keuangan masih sangat terbatas. Dengan demikian dibutuhkan adanya panduan yang mudah untuk memahami SAK-ETAP dan penyusunan laporan keuangan auditan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk panduan penyusunan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh pengusaha UMKM sehingga informasi keuangan akan berguna bagi para pihak yang berkepentingan.

METODE PENELITIAN

Data penelitian menggunakan data primer dengan melakukan survey, wawancara, kuesioner (terlampir) dan melalui *e-mail* kepada pengusaha UMKM di wilayah Depok yang terdaftar pada Departemen Koperasi pada periode 2010-2012. Kuesioner terlampir merupakan pengembangan dari kuesioner Rudiantoro & Siregar (2011).

Penelitian ini dilakukan secara bertahap selama dua tahun. Penelitian dilakukan dengan pendekatan pokok penelitian kualitatif.

Pada tahun pertama, difokuskan pada penyusunan panduan proses akuntansi berdasarkan SAK ETAP untuk UMKM, melalui tahapan: mengidentifikasi perusahaan UKM yang akan menjadi objek penelitian melalui instansi terkait, menyusun dan melakukan pengujian instrumen penelitian, mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden, verifikasi dan mengolah data penelitian, menganalisis data dan menyimpulkan, menyusun Laporan Penelitian, dan menyusun Luaran Penelitian berupa Panduan Proses akuntansi berdasarkan SAK ETAP untuk UMKM.

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sesuai bagan alir penelitian (terlampir).

Indikator capaian penelitian ini yaitu tersedianya Panduan Proses Akuntansi berdasarkan SAK ETAP untuk UMKM yang siap diimplementasikan.

Tahapan penelitian dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi perusahaan UKM yang akan menjadi objek penelitian melalui instansi terkait dengan cara:
 - menghubungi dengan melakukan pengiriman surat permohonan pertemuan dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk permohonan data.
 - melakukan pengiriman surat kepada pengurus DPC IWAPI Kota Depok terkait kegiatan penelitian.
 - Melakukan pertemuan dengan pengurus DPC IWAPI Kota Depok untuk membahas langkah-langkah kegiatan penelitian dan penentuan responden sesuai kriteria yang ditentukan (*purposive sampling*), antara lain: jasa/dagang/perusahaan manufaktur (pengolahan), memiliki aset maksimal Rp 200.000.000, omzet tahunan maksimum Rp 1 milyar, memiliki karyawan antara 55-99 orang (sesuai UU No.9/1995). Dari kriteria tersebut diperoleh 30 UKM.
 - Melakukan sosialisasi kegiatan penelitian dengan responden.
- 2) Menyusun dan melakukan pengujian instrumen Penelitian
- 3) Setelah menyusun instrumen penelitian maka dilakukan uji coba untuk mengukur validitas dari instrumen kepada 10 responden. Selanjutnya melakukan penyempurnaan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dan melakukan penggandaan. (kuesioner terlampir).
- 4) Mengumpulkan data: melakukan wawancara dengan responden
- 5) Kegiatan dengan melakukan pelatihan bagi pengumpul data supaya data diperoleh sesuai dengan kriteria penelitian. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner secara langsung didampingi oleh

pengumpul data. Telah diperoleh sebanyak 60% data.

5) Kegiatan lainnya

Kegiatan ini berupa pengadaan peralatan penunjang dan bahan habis pakai, antara lain melakukan survey untuk pembelian software akuntansi ke beberapa penyedia jasa penjualan software akuntansi dan melakukan penawaran dan negosiasi harga. Dari hasil negosiasi diputuskan memilih software akuntansi *Accurate* yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan bisnis UKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai gambaran secara umum, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, jumlah UMKM terus mengalami peningkatan yang cukup berarti. Baik dalam segi jumlah unit, serapan tenaga kerja, maupun sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku. Menurut catatan Kementerian Koperasi dan UMKM jumlah UMKM tahun 2010 sebesar 53,823,732 unit, meningkat menjadi 56.534.592 unit pada tahun 2012.

Dari hasil pertanyaan terbuka dan kuesioner yang diberikan, diperoleh beberapa hasil penelitian ini, terdapat permasalahan di bidang (1) Manajemen/SDM, berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, motivasi rendah, penguasaan teknologi; (2) Produksi, meliputi sejak bahan baku, proses produksi, maupun ketika output (hasil produksi); (3) Pemasarannya, meliputi keterbatasan pasar, distribusi maupun luas pasar yang dituju; (4) Keuangan, berkaitan dengan keterbatasan modal, sulit mencari tambahan modal dan juga keterbatasan dalam administrasi pembukuan/keuangan; (5) Iklim usaha yang kurang kondusif, berkaitan dengan peran pemerintah, regulasi dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan penelitian Nursetto (2004).

Selain itu, permasalahan krusial yang dihadapi oleh usaha kecil adalah pengelolaan keuangan karena pada umumnya pengelolaan keuangan usaha

kecil belum teradministrasi dengan baik dimana pengelolaan keuangan belum dipisahkan antara keperluan usaha dan keperluan pribadi (rumah tangga). Hal tersebut dapat berakibat pada kelangsungan usaha ke depannya karena pemilik usaha tidak bisa mengetahui secara pasti keuntungan yang diperoleh perbulannya dari usaha yang dijalankannya sehingga perencanaan usaha secara pasti tidak dapat dibuat (Rahmawati : 2008).

Secara umum responden UMKM di wilayah Depok khususnya belum menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi secara maksimal dalam pengelolaan usahanya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Rochmat, 2003; Fansuri, 2006; Firdaus, 2010; Hubeis, 2012). Rendahnya penyelenggaraan dan penggunaan informasi akuntansi dalam pengelolaan UMKM disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain persepsi terhadap urgensi keberadaan informasi akuntansi bagi UMKM, pengetahuan akuntansi pemilik/staf UMKM, pertimbangan biaya-manfaat bagi UMKM dan ukuran UMKM (Furqan dan karim: 2012).

Diperoleh data bahwa perbedaan penerapan akuntansi dilihat dari kategori omzet perusahaan. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian terdahulu Wahyudi (2009) bahwa omzet perusahaan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi. Begitu juga dengan pengalaman usaha manajer/pemilik UKM dan umur perusahaan sesuai bahwa omzet perusahaan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi. Begitu juga dengan pengalaman usaha manajer/pemilik UKM dan umur perusahaan sesuai dengan penelitian Wahyudi (2009) bahwa pengalaman usaha manajer/pemilik UKM dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi. Penerapan akuntansi pada UKM dipengaruhi oleh omzet perusahaan karena semakin tinggi omzet perusahaan berarti semakin kompleks pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu,

perusahaan membutuhkan bantuan suatu sistem yang dapat memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan, maka dari itu perusahaan menerapkan akuntansi. Adapun, perusahaan yang omzetnya masih kecil banyak yang belum menerapkan akuntansi karena dirasa masih belum perlu melakukan pengelolaan keuangan dengan rinci, cukup perhitungan manual saja. Selain itu, dengan omzet perusahaan yang masih kecil perusahaan merasa harus menanggung beban yang lebih besar daripada pendapatannya apabila menerapkan akuntansi. Karena UKM dengan omzet kecil menganggap akuntansi terlalu rumit dan membutuhkan banyak waktu. Berdasarkan hasil pengujian yang terkait dengan perbedaan penerapan akuntansi, ditemukan bukti bahwa ternyata memang ada perbedaan penerapan akuntansi pada tiap responden, namun perbedaan yang ada hanya disebabkan oleh salah satu karakteristik responden, yaitu adanya perbedaan penerapan akuntansi antar kategori omzet perusahaan.

Dalam beberapa penelitian secara umum beberapa penyebab atas fenomena tidak terselenggarakannya praktik akuntansi secara optimal dan tidak termanfaatkannya informasi akuntansi pada UMKM sebagaimana beberapa hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi terhadap urgensi keberadaan informasi akuntansi bagi UMKM.

Tidak adanya penyelenggaraan dan penggunaan informasi akuntansi dalam kebanyakan pengelolaan usaha kecil ditentukan oleh persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi. Bagi sebagian besar UMKM, tidak pentingnya pemanfaatan informasi akuntansi karena mereka merasa tidak membutuhkan informasi akuntansi (Hariyanto, 1999) dan memandang akuntansi merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dijangkau (Idrus, 2000). Namun, jika ditelusuri secara mendalam, hasil penelitian Pinasti (2007) terhadap Pengusaha UMKM di Wilayah Propinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa

penyelenggaraan dan penggunaan informasi akuntansi terbukti secara empiris mempunyai pengaruh terhadap persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi. Atau dalam kata lain, ketika pengusaha kecil telah merasakan manfaat atas keberadaan informasi akuntansi maka mereka akan menganggap bahwa informasi akuntansi penting bagi mereka, namun sebaliknya selama pengusaha kecil tersebut tidak pernah menggunakan informasi akuntansi maka informasi akuntansi dianggap sesuatu yang tidak penting.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian hasil penelitian Pinasti (2001) yang menunjukkan bahwa para pedagang kecil di pasar tradisional Kabupaten Banyumas selama ini tidak menyelenggarakan dan tidak menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Keputusan-keputusan dalam pengelolaan usaha lebih banyak didasarkan pada informasi-informasi non-akuntansi dan pengamatan sepintas atas situasi pasar, sehingga yang terjadi adalah bagi para pedagang kecil tersebut, informasi akuntansi tidak penting. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa tidak diterapkannya praktik akuntansi secara optimal pada sebagian besar UMKM selama ini dikarenakan para pelaku UMKM belum pernah merasakan manfaat dari informasi akuntansi.

- b. Pengetahuan Akuntansi Pemilik/Staf UMKM

Menurut berbagai penelitian dalam Marbun (1997), salah satu kelemahan usaha kecil di Indonesia ialah pada umumnya mereka tidak menguasai dan tidak mempraktekkan sistem keuangan yang memadai. Pada umumnya usaha kecil tidak atau belum memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola catatan akuntansi secara ketat dan berdisiplin dengan pembukuan yang teratur, baik dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya,

sehingga banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha.

Walaupun Rudiantoro & Siregar (2011) menemukan bahwa jenjang pendidikan terakhir dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengusaha UMKM terhadap pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya. Namun, hasil penelitian tersebut tidak berarti bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan akuntansi pemilik/staf akuntansi pada UMKM terhadap praktik akuntansi di UMKM, karena sebagaimana hasil penelitian Suhairi, dkk (2004) yang menemukan bahwa locus pengawasan, keinginan berprestasi, dan pengetahuan akuntansi memberikan pengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam keputusan investasi dan hasil penelitian misra (2004) dalam misra (2008) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan disiplin ilmu staf akuntansi terhadap praktik akuntansi pada usaha kecil dan menengah (UKM), serta hasil studi Meutia (2010) yang menyimpulkan bahwa kompetensi wirausaha sangat mempengaruhi tingkah dan perilaku wirausaha dalam bertindak, yang mana keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi dan pengetahuan akuntansi pelaku/staf UMKM terhadap pemanfaatan informasi akuntansi, yang mana hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Rudiantoro & Siregar (2011) lainnya yang menyatakan bahwa pemberian informasi dan sosialisasi serta jenjang pendidikan terakhir pengusaha UMKM ternyata berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman pengusaha terkait SAK-ETAP sebagai dasar dalam praktik akuntansi pada UMKM saat ini. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa tidak diterapkannya praktik akuntansi secara

optimal pada sebagian besar UMKM selama ini dikarenakan pengetahuan akuntansi baik pemilik maupun staf keuangan/akuntansi UMKM saat ini masih belum memadai.

c. Pertimbangan Biaya-Manfaat (*cost-effectiveness*) bagi UMKM.

Salah satu alasan tidak adanya catatan akuntansi yang memadai pada UMKM adalah kebutuhan akan pengadaan catatan akuntansi yang dianggap hanya membuang-buang waktu dan biaya (Marbun, 1997). Para pelaku UMKM merasa terlalu direpotkan dengan penyelenggaraan catatan akuntansi tersebut dan menganggap bahwa yang penting adalah mereka mendapatkan laba tanpa direpoti dengan penyelenggaraan akuntansi (Pinasti, 2001). Hal terpenting bagi UMKM adalah cara menghasilkan laba sebanyak mungkin dari usaha yang dijalankan tanpa direpoti dengan masalah pembukuan/akuntansi (Idrus, 2000). Atas hasil-hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa Para pelaku UMKM menganggap bahwa manfaat atas informasi akuntansi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan biaya yang harus mereka korbakan ketika mereka menyelenggarakan praktik akuntansi secara tepat.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Wahdini & Suhairi (2006) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat penyusunan laporan keuangan pada UKM di Indonesia adalah adanya kewajiban UKM menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sama dengan usaha besar. Kewajiban menggunakan standar pengukuran yang sama, telah memberatkan UKM dalam penyusunan laporan keuangan, karena untuk menghasilkan informasi akuntansi (baca laporan keuangan), UKM membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh dari adanya informasi akuntansi tersebut.

Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa tidak diterapkannya praktik akuntansi secara optimal pada sebagian besar UMKM selama ini dikarenakan manfaat yang diperoleh atas praktik akuntansi lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan.

d. Ukuran UMKM.

Pinasti (2001) menemukan bahwa ukuran usaha merupakan faktor yang sulit dipisahkan dengan lingkungan pengusaha UMKM. Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan makin besarnya ukuran usaha maka dapat mendorong seseorang untuk berpikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya. Berkaitan ukuran UMKM dan hubungannya dengan praktik akuntansi pada UMKM, hasil penelitian Rudiantoro & Siregar (2011) menunjukkan bahwa ukuran usaha berpengaruh positif terhadap Persepsi Pengusaha UMKM atas pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya, sehingga di saat semakin tumbuh dan besarnya usaha UMKM, maka pengusaha mulai memandang penting kebutuhan laporan keuangan tersebut. Semakin besar usaha maka pemiliknya mulai memikirkan pentingnya suatu pembukuan dan pelaporan keuangan untuk membantu dalam pengelolaan aset dan penilaian kinerja keuangannya. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa tidak diterapkannya praktik akuntansi secara optimal pada sebagian besar UMKM selama ini dikarenakan jumlah UMKM di Indonesia masih didominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil, yang mana pada kedua jenis kelompok usaha tersebut masih lebih banyak dikelola secara perseorangan dengan manajemen seadanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan praktik akuntansi pada UMKM maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

- a. Secara umum keberadaan UMKM di Indonesia semakin memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun, tidak hanya peningkatan jumlah unit UMKM, tetapi juga peningkatan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja, PDB, total ekspor non migas dan investasi nasional.
- b. Praktik akuntansi pada UMKM di Indonesia masih rendah, sehingga menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengembangan UMKM. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu persepsi terhadap urgensi keberadaan informasi akuntansi bagi UMKM, pengetahuan akuntansi pemilik/staf UMKM, pertimbangan *biaya-manfaat* bagi UMKM dan ukuran UMKM.
- c. Fenomena tidak terselenggarakannya praktik akuntansi dan tidak termanfaatkannya informasi akuntansi secara optimal pada UMKM selama ini bukanlah semata-mata merupakan kesalahan ataupun kekurangan para pelaku UMKM, tetapi juga dikarenakan belum optimalnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam mendorong dan memfasilitasi praktik akuntansi di UMKM.
- d. Salah satu penyebab sulitnya pengembangan UMKM adalah ketidakmampuan UMKM mengakses kredit, yang mana hal ini dikarenakan tidak tersedianya informasi akuntansi secara lengkap pada UMKM dan karena tidak optimalnya praktik akuntansi di UMKM. Untuk itu, dalam rangka mengembangkan UMKM dan menciptakan UMKM yang *feasible*, *bankable*, *accountable*, dan *profitable* maka sangat dibutuhkan partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam mendorong diterapkannya praktik

- akuntansi di UMKM secara tepat, implementatif dan berkelanjutan.
- e. Secara khusus penerapan akuntansi untuk UMKM di wilayah Depok dan sekitarnya masih memiliki permasalahan yang sama dengan beberapa daerah di Indonesia sehingga solusi dan pendekatan untuk meningkatkan akuntabilitas yang tertuang dalam laporan keuangan secara umum seragam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada P3M dan manajemen Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya kepada Dirjen Dikti yang telah mendanai penelitian ini dengan menggunakan dana BOPTN. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga disampaikan kepada pengurus IWAPI DPC Depok dan anggotanya yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abubakar Arif., dan Wibowo. 2005. *Akuntansi untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah*. PT Grasindo : Jakarta.
- [2] Baas, Timo dan Schrooten, Mechthild. 2006. *Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis*. Small Business Economic Vol 27.
- [3] Bastri, Yuswar Zainul dan Nugroho, Mahendro. 2009. *Ekonomi Kerakyatan :Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti Bank Mandiri.
- [4] Benjamin, W.P., 1990, Laporan Keuangan (Ikhtisar Akuntansi) Perusahaan Kecil, Dalam, Dalam Prosiding, Seminar Akuntan Nasional, Surabaya.
- [5] Cziráký, Tiśma, dan Pisarović. 2005. *Determinant Of Low Approval Rate In Croatia*. Small Business Economic, Vol 25.
- [6] Husein Umar. 2001. *Riset Akuntansi*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- [7] Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- [8] Ikatan Akuntan Publik Indonesia. 2012. *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- [9] Jati, Hironnymus, Bala, Beatus, dan Otnil Nisoni. 2009. Menumbuhkan Kebiasaan Usaha Kecil Menyusun Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Usahawan*, II No. 8, 210 – 218.
- [10] Junita, Fanny. 2009. Persepsi Pengusaha Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Terhadap Kebutuhan Audit Atas Laporan Keuangan, Tesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
- [11] Meutia. 2010. Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Menengah Melalui Kompetensi Kewirausahaan dan Modal Sosial, (Sebuah Kajian Teoritis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Tirtayasa Ekonomi*. Vol. 5 (2). Hal. 167-174.
- [12] Misra, Fauzan. 2008. Investigasi Dan Analisis Empiris Praktik Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah). *Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*. Jogyakarta. Tidak Dipublikasikan.
- [13] Mohan, Isaac. 2006. *Financial Record-Keeping as a Tool For Small Business Success: A Case Study Of Free State Province, South Africa*.
- [14] Murniati. 2002. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Pengusaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [15] Pinasti, M. 2001. Penggunaan Informasi Akuntansi dalam

- Pengelolaan Usaha Para Pedagang Kecil di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, No 1 Vol 3.
- [16] _____. 2007. Pengaruh Penyelenggaraan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Persepsi Pengusaha Kecil atas Informasi Akuntansi: Suatu Riset Eksperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 10 (3). Hal. 321-331.
- [17] Presiden Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- [18] Raharjo, M. D., & Ali, F. 1993. Faktor-faktor keuangan yang mempengaruhi usaha kecil dan menengah di Indonesia, Dalam K. James & N. Akrasanee, *Aspek-aspek finansial usaha kecil dan menengah; Studi kasus Asean*, (pp. 16-50). Jakarta: LP3ES.
- [19] Rakyat Merdeka *Online*. (2011). Syarif Hasan: Jumlah Koperasi dan UMKM Terus Meningkat. <http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/22/49791/Syarif-Hasan:-Jumlah-Koperasi-dan-UMKM-Terus-Meningkat-> Akses tanggal 16 April 2012.
- [20] Republik Indonesia, 1995, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta.
- [21] Rudiantoro, Rizki dan Siregar, Sylvia Veronica, 2011, Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP, Simposium Nasional Akuntansi XI, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- [22] Satyo, 2005. UKM dan Kebutuhan Standar, *Media Akuntansi*, 43(XII), 4.
- [23] Suhairi dan Wahdini, 2006, Persepsi Akuntan Terhadap *Overload* Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil Dan Menengah, Makalah yang disampaikan pada SNA IX-Padang
- [24] Suhairi, 2004, *Personality, Accounting Knowledge, Accounting Information Usage and Performance: A Research On Entrepreneurship Of Indonesia Medium Industries*, Disertasi, USM, Malaysia.
- [25] Sujoko Efferin., dan Bonnie Soeherman. 2005. “Analisis Empiris Tentang Peran Akuntansi Manajemen Dalam Perencanaan dan Pengendalian UKM”, *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, Vol. 4, No. 2: 71-91.
- [26] *Undang-Undang No. 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil*, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1995/1996.
- [27] Warsono, Sony dan Murti, Endra. 2010. Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan. Yogyakarta.
- [28] Website: www.bi.go.id
- [29] Website: www.depkop.go.id
- [30] Website: www.ekonomirakyat.org/edisi_20/a_rtikel_7.htm
- [31] Website: www.menlh.go.id/usaha-kecil/top/kriteria.htm/2010